KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT TERHADAP PROGRAM PENGEMBANGAN NUKLIR KOREA UTARA PADA MASA PEMERINTAHAN BARACK OBAMA

KRISANDHY ERTANTO RANTUNG

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia
Jalan Dipati Ukur No. 112 Bandung 40132 Indonesia

E-mail: sandysky77@gmail.com

ABSTRACT

North Korea is a nuclear owner country with overwhelming military force which is considered as a serious threat to the international community, especially for the United States. In the name of humanity and the movement of nuclear non-proliferation, the United States seeks to urge North Korea to want to stop and destroy its nuclear development program. The foreign policy of the United States government has taken against North Korea this time of course begs the question, why and how the United States is not using a strategy of pre-emptive strike, whereas North Korea has really proven to develop and possess nuclear weapons.

This study is about the foreign policy of the United States toward North Korea's nuclear development program during the administration of Barack Obama in in the period 2009-2016. The White House issued a statement from President Obama stating; "United States does not, and never will, accept North Korea as a nuclear state. Far from achieving its stated national security and economic development goals, North Korea's provocative and destabilizing actions have instead served to isolate and impoverish its people through its relentless pursuit of nuclear weapons and ballistic missile capabilities".

The method used in this research is using qualitative methods. Most of the data collected from interviews and literature and supported by the literature, data searches online, journals, or reports from relevant agencies, documentation and observation later analyzed with the approach of International Relations. The research was conducted in The Embassy of the United States to the Republic of Indonesia and the Indonesian Institute of Sciences. The results showed that Barack Obama would prefer a multilateral approach to manage conflicts and reinforce "smart power" and tend to implement policies in an integrated manner. Emphasis on coordination and consultation has been the first principle of every decision of Obama administration's policies towards North Korea.

Keywords: United States Foreign Policy, North Korea, Nuclear

ABSTRAK

Korea Utara merupakan negara pemilik nuklir dengan kekuatan militer yang sangat besar yang dinilai sebagai ancaman serius bagi dunia internasional khususnya Amerika Serikat. Dengan mengatasnamakan kemanusiaan dan gerakan non-proliferasi nuklir, Amerika Serikat berupaya mendesak Korea Utara agar mau menghentikan dan memusnahkan program pengembangan nuklirnya. Kebijakan luar negeri yang diambil pemerintah Amerika Serikat terhadap Korea Utara kali ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa dan bagaimana Amerika Serikat tidak menggunakan strategi pre-emptive strike, padahal Korea Utara telah benar-benar terbukti mengembangkan dan memiliki senjata nuklir.

Penelitian ini ialah mengenai kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Barack Obama periode 2009-2016. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan dari Presiden Obama yang menyatakan; "Amerika Serikat tidak pernah, dan tidak akan menerima Korea Utara sebagai negara senjata nuklir. Bukannya memperoleh keamanan nasional dan tujuan pengembangan ekonomi yang dicita-citakan, tetapi aksi provokatif dari Korea Utara justru membawa isolasi dan kemiskinan bagi rakyatnya melalui usaha untuk mencapai kapabilitas senjata nuklir dan rudal balistik".

Metode yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan metode kualitatif. Sebagian besar data dikumpulkan dari hasil wawancara dan literatur serta didukung oleh studi pustaka, penelusuran data online, jurnal, ataupun laporan dari instansi terkait, dokumentasi dan observasi yang kemudian di analisis dengan pendekatan Ilmu Hubungan Internasional. Penelitian dilakukan di Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Barack Obama lebih memilih pendekatan multilateral untuk mengelola konflik sekaligus menekankan "smart power" dan cenderung untuk melaksanakan kebijakan secara terpadu. Penekanan pada koordinasi dan konsultasi telah menjadi prinsip pertama dari setiap keputusan kebijakan pemerintahan Obama terhadap Korea Utara.

Kata Kunci: Kebijakan Luar Negeri Amerika, Korea Utara, Nuklir

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Kebijakan luar negeri merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional spesifik yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional.

Kebijakan luar negeri dan kepentingan nasional adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dikarenakan tujuan dari kebijakan luar negeri ialah untuk memperoleh keuntungan dari luar agar dapat memenuhi kepentingan dalam negeri. Dengan kata lain, kebijakan luar negeri adalah perwujudan dari kepentingan nasional suatu negara, yang mana tujuan dan sasaran yang ingin dicapai akan selalu berpatokan pada apa yang menjadi kebutuhan dalam negerinya. Kebutuhan tersebut misalnya kebutuhan politik dan keamanan, sosial budaya juga ekonomi.

Pergantian kepemimpinan di Amerika Serikat dari George W Bush kepada Barack Obama tahun 2009 lalu merupakan sebuah fenomena yang baru pertama kali terjadi, karena untuk pertama kalinya kandidat presiden Amerika Serikat yang berasal dari kulit hitam ini mampu memenangkan pemilihan umum pada tahun 2009. Presiden George Bush merupakan presiden yang berasal dari partai Republik sedangkan calon presiden Barack Obama berasal dari partai Demokrat. Untuk itu sudah pasti kebijakan yang diambilpun berbeda. Kebijakan presiden George Bush terkenal dengan keras dan lebih mengedepankan militer sedangkan senator Barack Obama lebih mengedepankan diplomasi (Muna, 2009 : 86-87).

Berakhirnya Perang Dunia Kedua yang dimenangkan oleh tentara Sekutu (dimotori oleh Amerika Serikat) telah membuka babak baru dalam sejarah politik Korea. Kemenangan tentara sekutu atas tentara Jepang merupakan akhir dari penjajahan Jepang terhadap bangsa Korea. Bercita-cita menjadi bangsa yang mandiri dan berdaulat pasca pendudukan Jepang, bangsa Korea berada dibawah kontrol negara-negara pemenang perang dunia II (Yoon & Mas'oed, 2003 : 114).

Amerika Serikat dan Uni Soviet sepakat untuk membagi Semenanjung Korea menjadi dua bagian. Korea terbagi pada garis lintang 38 derajat menjadi Korea Utara dan Korea Selatan. Uni Soviet menguasai bagian utara dan terbentuk menjadi *Democratic People's Republic of Korea*, sementara Amerika Serikat menduduki bagian selatan dan berdiri sebagai *Republic of Korea*. Baik Korea Utara maupun Korea Selatan sama-sama mengadopsi ideologi yang dimiliki oleh negara yang pernah menguasainya dan terlibat dalam persaingan ideologi hingga pada masa sekarang.

Pemisahan Semenanjung Korea tersebut merupakan awal dari pengenalan teknologi nuklir oleh Korea Utara. Korea Utara mendapatkan ilmu tentang nuklir secara tidak langsung dari Uni Soviet, yaitu ketika dilakukan penelitian mengenai penambangan biji monazit oleh Uni Soviet. Pengembangan energi nuklir Korea Utara telah dimulai sejak tahun 1965 berupa pembangunan reaktor nuklir model Uni Soviet untuk tujuan penelitian di Yongbyon. Pada tahun 1970 Korea Utara kembali membangun reaktor nuklir yang kedua. Korea Utara menandatangani Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir pada tahun 1985, dan pada tahun 1989 kegiatan nuklir Korea Utara terdeteksi oleh satelit komersial Perancis.

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari *Nuclear Non-Proliferation* (NPT) atau Perjanjian Non-Proliferasi nuklir pada tahun 1993. Tindakan Korea Utara menarik diri dari NPT jelas menimbulkan reaksi dunia, khususnya Amerika Serikat. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT itu dengan *International Atom and Energy Agency* (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional pada Januari 1992. Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak IAEA melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak. Hal ini berbeda jauh dengan laporan Korea Utara yang mengatakan kepada IAEA bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 gram bahan nuklir dari fasilitas nuklirnya (Kronologi Program Nuklir Korut melalui http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_02.htm diakses 18 Oktober 2016).

Dengan hasil itu IAEA segera meminta pelaksanaan inspeksi khusus, namun Korea Utara menolak permintaan itu dan menarik diri dari NPT sebagai aksi protes. Hampir setahun penuh negosiasi dilakukan namun gagal, kemudian konflik tentang masalah nuklir Korea ini sempat membawa krisis yang hampir menyebabkan terjadinya perang pada Juni 1994. Puncak dari krisis nuklir tahap pertama terjadi pada tahun 1998 dimana Korea Utara meluncurkan rudal *Taepodong-1* dengan jangkauan jelajah 1.700 km sebagai uji coba.

Pada bulan Juli 2006, Korea Utara kembali meluncurkan *Taepodong-2* yang memiliki jangkauan tembak lebih jauh. Tindakan ini mendapat kecaman dari Amerika Serikat dan juga negara-negara didunia. PBB kemudian memberikan sanksi embargo keuangan dan militer yang keras terhadap Korea Utara, yang dituangkan dalam Resolusi 1718 Tahun 2006. Dorongan dan tekanan dari sejumlah pihak untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Korea Utara akan dianggap atau sama artinya dengan mengajak perang.

Pada tanggal 26 Mei 2009 dunia kembali dibuat gempar oleh uji coba nuklir Korea Utara. Uji coba nuklir Korea Utara tersebut mengakibatkan terjadinya gempa dengan kekuatan 4,5 skala *richter*. Diperkirakan ledakan dahsyat tersebut dihasilkan dari peledak seberat 20 ton, yang setara dengan bom-bom Amerika yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki tahun 1945. Presiden Amerika Barack Obama menyatakan program nuklir Korea Utara itu merupakan ancaman besar terhadap perdamaian dunia. Uji coba nuklir ini telah melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1718.

Pada 12 Februari 2013, media Korea Utara mengumumkan bahwa negara tersebut telah melancarkan uji coba nuklir bawah tanah, yang merupakan uji coba ketiganya dalam tujuh tahun. Gempa yang diakibatkan oleh uji coba dilacak oleh *China Earthquake Networks Center*, *Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization Preparatory Commission* dan *United States Geological Survey*, dan tercatat berskala 4,9 (nantinya diubah menjadi 5,1) SR. Sebagai tanggapan, Jepang menyerukan pertemuan darurat Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Korea Selatan meningkatkan status waspada militer (http://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2013/on-the-ctbtos-detection-in-north-korea/ diakses 19 Oktober 2016).

Selanjutnya Korea Utara melakukan peledakan nuklir keempat pada 6 Januari 2016 di 10:00:01 UTC + 08:30. Di situs nuklir Punggye-ri, sekitar 50 kilometer (30 mil) barat laut dari Kota Kilju di Kabupaten Kilju. Media Korea Utara membuat pengumuman bahwa rezim Kim Jong Un telah berhasil menguji bom hidrogen. Namun, para ilmuwan sebagai pihak ketiga serta pejabat dan lembaga di Korea Selatan meragukan klaim Korea Utara dan berpendapat bahwa perangkat seperti itu lebih cocok digunakan untuk bom fisi seperti fisi senjata pendorong. Senjata tersebut menggunakan fusi hidrogen untuk menghasilkan daya ledak lebih kecil, hulu ledak lebih cocok digunakan untuk mempersenjatai perangkat pengiriman senjata seperti rudal, bukan untuk mencapai kekuatan destruktif sebagaimana bom hidrogen yang sebenarnya (http://www.bbc.com/news/world-asia-17823706 diakses 19 Oktober 2016).

Uji coba tersebut menuai kecaman dan kritik dari masyarakat internasional. Meskipun Tiongkok dan Rusia menyerukan agar Korea Utara untuk kembali ke hasil kesepakatan perundingan enam negara, Korea Utara tetap mempertahankan ambisinya untuk mengembangkan senjata nuklir, yaitu pada tanggal 22 Juni 2016, Korea Utara berhasil meluncurkan rudal darat jarak menengah *Musudan-1* ke ketinggian 1,413.7 kilometer (878.4 mi) dan dengan jangkauan 400 kilometer (250 mil). Serta pada tanggal 24 Agustus 2016, Korea Utara berhasil meluncurkan rudal balistik berbasis kapal selam, *Pukkuksong-1* ke Zona Identifikasi Pertahanan Udara Jepang dengan jangkauan 500 kilometer (310 mil) dan ketinggian yang sama. Korea Utara tengah mengembangkan teknologi untuk dapat melakukan serangan kedua dengan menggunakan teknologi sistem peluncuran vertikal yang lebih baik dan roket berbahan bakar padat (https://www.armscontrol.org/ACT/2016_07/News/UN-IAEA-Denounce-North-Korean-Actions diakses 19 Oktober 2016).

Dan baru-baru ini pemerintah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 9 September 2016 di Situs Uji Coba Nuklir *Punggye-ri*, sekitar 50 kilometer (30 mil) sebelah barat laut dari Kota Kilju. Uji coba ini dilatarbelakangi oleh latihan militer gabungan dua tahunan antara Amerika Serikat dan Korea Selatan antara *Foal Eagle* dan *Ulchi Freedom Guardian* pada bulan Februari sampai April kemudian pada bulan Agustus sampai September 2016. Korea Utara menganggap latihan tersebut sebagai "*kekuatan musuh yang sedang mempersiapkan untuk invasi ke Korea Utara*". Pada tanggal 5 September 2016, Korea Utara menembakkan tiga rudal *Rodong-1* berturut-turut dengan akurasi yang tinggi. Hal ini menandai *Rodong-1* sebagai rudal yang layak untuk dioperasikan dalam perang sejak pertama sukses meluncur di tahun 1993. Dewan Keamanan PBB mengutuk uji coba rudal Korea Utara, yang kemudian Korea Utara merespons dengan keras langkah tersebut (http://edition.cnn.com/2016/09/05/asia/north-korea-ballistic-missiles/ diakses 19 Oktober 2016).

Gedung Putih mengeluarkan pernyataan dari Presiden Obama yang menyatakan; "*Amerika Serikat tidak pernah, dan tidak akan menerima Korea Utara sebagai negara senjata nuklir. Bukannya memperoleh keamanan nasional dan tujuan pengembangan ekonomi yang dicita-citakan,*

tetapi aksi provokatif dari Korea Utara justru membawa isolasi dan kemiskinan bagi rakyatnya melalui usaha yang keras untuk mencapai kapabilitas senjata nuklir dan rudal balistik". Uji coba saat ini, adalah pelanggaran terang-terangan dari berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB, membuat Korea Utara yang terus melanggar norma internasional dan sikap umumnya akhirnya menunjukkan mereka tidak mempunyai minat untuk bergabung dalam masyarakat internasional (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/09/09/statement-president-north-koreas-nuclear-test diakses 20 Oktober 2016).

Pada saat pemerintahan Obama memiliki ruang politik untuk melakukan dialog langsung dengan Korea Utara, telah diputuskan untuk melakukan pendekatan yang oleh Menteri Luar Negeri Clinton gambarkan sebagai "*strategic patience in close consultations with our six party allies*" atau "kesabaran strategis dalam konsultasi erat dengan enam sekutu kami". Penekanan pada koordinasi dan konsultasi telah menjadi prinsip pertama dari setiap keputusan kebijakan pemerintahan Obama terhadap Korea Utara, dan itu sangat dibantu oleh fakta bahwa Obama dan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak telah melakukan pembicaraan empat mata dengan kesepakatan kepada prioritas dan pentingnya denuklirisasi Korea Utara.

Strategi Obama juga bersandar pada asumsi bahwa provokasi Korea Utara akan mengakibatkan isolasi diri dari tetangga terdekatnya, tiap langkah tanpa melibatkan Korea Utara tidak akan menghasilkan manfaat politik yang diperlukan dan bisa mengekspos pemerintah untuk resiko politik yang besar. Hal ini pernah disampaikan oleh Menteri Pertahanan Robert Gates bahwa pemerintah "*tidak akan membeli kuda untuk ketiga kalinya*" untuk menujuk kemungkinan perundingan nuklir AS dan mengingat kapasitas jangka pendek Korea Utara untuk lebih memperkuat kemampuan nuklirnya sebagian besar masih terkendali.

Kebijakan "*Strategic Patience*", yakni kebijakan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat bisa menunggu Korea Utara untuk membuat keputusan denuklirisasi, selaras dengan realitas politik atas kasus tenggelamnya kapal Korea Utara dan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada bulan Maret dan November 2010. Namun setelah menurut analisis ilmuwan Universitas Stanford, Siegfried Hecker, upaya Korea Utara untuk memperkaya uranium dan membangun reaktor ringan telah menuju kepada keberhasilan, sehingga pemerintahan Obama mengadakan tiga kali pembicaraan langsung dengan Korea Utara pada Juli 2011 hingga Februari 2012. Upaya pemerintahan Obama mengejar negosiasi bilateral dengan Korea Utara merupakan usaha untuk memastikan bahwa perundingan bilateral tersebut tidak membuka kesalahpahaman bagi Seoul atau Tokyo (*Council on Foreign Relations*, 2013 melalui http://www.cfr.org/north-korea/us-policy-toward-north-korea/p29962 diakses 3 Desember 2016).

Maka berdasarkan penjelasan dan pemaparan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

"Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama."

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: *"Bagaimana Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama?".*

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, menganalisis dan menjelaskan kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara pada masa pemerintahan Barack Obama.

1.4 Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan memberikan beberapa manfaat diantaranya : 1) *Aspek Teoritis*, diharapkan memberikan kontribusi yang besar terhadap pengembangan ilmu-ilmu sosial dan politik khususnya Hubungan Internasional, dalam kaitannya dengan Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama. Melalui penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk menguji serta menjelaskan konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional, dimana terdapat sebuah negara adidaya yang berupaya menghentikan program nuklir suatu negara yang mengancam dunia internasional. 2) *Aspek Praktis*, Tulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pengetahuan informasi dan studi empiris bagi kalangan akademisi di bidang Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan yang dilakukan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Barack Obama terhadap program pengembangan nuklir Korea Utara.

2. Tinjauan Pustaka dan Kerangka Pemikiran

2.1 Hubungan Internasional

Hubungan internasional adalah hubungan yang melintasi batas negara yang dengan adanya hubungan internasional dapat menghilangkan sekat-

sekat yang ada yang menjadi penghalang para aktor hubungan internasional dalam menjalin hubungan. Hubungan yang melintasi batas negara tersebut mencakup hubungan antara satu negara dengan negara lain, hubungan yang dibangun baik itu berupa hubungan kerjasama maupun hubungan yang bersifat konflik. Dalam buku *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Anak Agung Banyu Perwita & Yanyan Mochamad Yani menyatakan:

"Hubungan Internasional merupakan bentuk interaksi antara aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain yang melintasi batas-batas negara. Terjadinya hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdependensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri terhadap dunia luar" (Perwita & Yani, 2005: 3-4).

2.2 Kebijakan Luar Negeri

Dalam mempelajari politik luar negeri suatu yang pada dasarnya adalah *action theory* suatu negara melalui sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah negara tersebut dalam rangka mencapai kepentingan nasional mereka.

Secara umum, politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan suatu perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional. suatu komitmen yang pada dasarnya merupakan strategi dasar untuk mencapai tujuan baik dalam konteks dalam negeri dan luar negeri serta sekaligus menentukan keterlibatan suatu negara di dalam isu-isu internasional atau lingkungan sekitarnya (Perwita & Yani, 2005 : 47).

Politik luar negeri sebagai suatu sistem, rangsangan dari lingkungan Eksternal dan domestik sebagai input yang mempengaruhi politik luar negeri suatu negara dipersepsikan oleh para pembuat keputusan dalam suatu proses konversi menjadi *output*. Proses konversi yang terjadi dalam perumusan Politik Luar Negeri suatu negara ini mengacu pada pemaknaan situasi, baik yang berlangsung dalam lingkungan Eksternal maupun Internal dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai serta sarana dan kapabilitas yang dimilikinya (Rosenau dalam Yani, 2010 : 3).

2.2.1 Kebijakan Luar Negeri Sebagai Tindakan Politik Luar Negeri

Dewasa ini, ketika hubungan antar negara serta sistem perpolitikan di antara mereka semakin kompleks dan telah berkembang pesat, perlu sebuah kebijakan baru dalam bidang politik untuk menampung segala aspirasi dan kebutuhan mereka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Politik kemudian sarat menjadi salah satu media untuk mencapai kepentingan-kepentingan tersebut. Melihat tatanan dunia yang semakin maju seperti saat ini, tentu saja mendorong para pemimpin negara untuk berupaya memenuhi kepentingan mereka, baik kepentingan dalam negeri maupun kepentingan yang sifatnya lebih global.

Dalam suatu negara, kebijakan luar negeri menjadi sebuah tindakan penting yang harus diambil guna menjaga hubungan negaranya dengan negara lain karena kebijakan luar negeri merupakan bentuk sikap negara tersebut untuk menunjukkan peran negara dalam sistem internasional yang dapat membuat negara-negara lain ingin melakukan kerjasama bila memiliki kesamaan tujuan. Kebijakan luar negeri juga digambarkan sebagai sebuah sikap yang mana dalam perspektif ini kebijakan luar negeri dipandang sebagai suatu sistem yang keputusannya dirumuskan dan direncanakan untuk melakukan eksekusi (Dugis, 2007 : 41).

Terdapat empat unsur dalam proses pembuatan kebijakan, yakni pilihan, keputusan, tindakan, dan hasil. Pilihan merupakan beberapa kemungkinan yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat keputusan untuk menetapkan kebijakan. Keputusan merupakan pilihan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tindakan merupakan perilaku yang didasarkan pada keputusan yang telah dibuat. Tindakan biasanya dilakukan untuk memengaruhi aktor dari negara lain. Dan yang terakhir adalah hasil. Hasil dari kebijakan yang telah diterapkan yang cenderung bersifat abstrak. Sebab hasil dari sebuah kebijakan juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan negara lain sebagai respon dari interaksi antar negara (Breuning, 2007 : 7-8).

2.3 Kepentingan Nasional

Kepentingan nasional sangat penting untuk menjelaskan dan memahami perilaku internasional. Konsep kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri suatu negara. Dalam buku Perwita dan Yani para penganut realis mendefinisikan kepentingan nasional sebagai berikut:

"Kepentingan nasional sebagai upaya negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang dapat mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini dapat melalui teknik pemaksaan atau kerjasama. Karena itu kekuasaan dan kepentingan nasional dianggap sebagai sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan suatu negara untuk bertahan hidup (*survival*) dalam politik internasional" (Perwita & Yani, 2005 : 35).

2.4 Diplomasi

Diplomasi secara sederhana dapat dipahami sebagai cara dan seni bernegosiasi yang dilakukan oleh berbagai pihak untuk memperolah sesuatu yang menjadi tujuan dari dilakukannya negosiasi tersebut. Bagi Ivo D. Duchacek mendefinisikan diplomasi sebagai praktik pelaksanaan politik luar negeri suatu negara terhadap negara lain melalui sarana negosiasi. Sedangkan Jr. Chid mendefinisikan diplomasi sebagai proses atau metode pelaksanaan kebijakan luar negeri (Duchacek & Chid dalam Shoelhi, 2011 : 78).

Maka dengan kata lain diplomasi merupakan seni bernegosiasi yang dilakukan oleh utusan-utusan negara untuk mempengaruhi utusan negara lain agar mau mengikuti keinginan yang melakukan diplomasi tersebut. Kemudian yang menjadi tujuan diplomasi menurut Kautilya yang dikutip oleh Mohammad Shoelhi adalah sebagai berikut:

1. *Acquisition*, perolehan informasi sebagai bahan yang diperlukan untuk mengambil keputusan atau pertimbangan kebijakan.
2. *Preservation* (pemeliharaan), maksudnya diplomasi bertujuan untuk memelihara hubungan baik dan kerjasama.
3. *Augmentation* (penambahan), maksudnya diplomasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan.
4. *Proper distribution* (pembagian yang adil), maksudnya diplomasi bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian hubungan melalui pembagian yang adil (Kautilya dalam Shoelhi, 2011 : 89).

2.5 Keamanan Internasional

Dalam dunia internasional, keamanan memiliki posisi yang sangat penting dan bilamana keamanan nasional terganggu maka akan menyebabkan gangguan terhadap keamanan internasional karena akan berpengaruh terhadap negara sekitarnya. Menurut Barry Buzan, keamanan dalam arti objektif mengukur adanya ancaman terhadap nilainilai yang diperoleh, dalam arti subjektif, tidak adanya ketakutan bahwa nilai-nilai tersebut akan diserang (Buzan, 2008 : 2, 4, 12).

Keamanan internasional terdiri dari berbagai kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara atau organisasi internasional seperti PBB dalam menjamin kelangsungan hidup dan keamanan bersama. Konsep keamanan terus berkembang selama bertahun-tahun hingga saat ini cakupannya mulai dari tipe tradisional yaitu konvensional kekuatan militer, sebab dan akibat perang, kekuatan ekonomi, konflik etnis, agama dan ideologi, konflik perdagangan dan ekonomi, pasokan energi, ilmu pengetahuan dan teknologi, makanan serta ancaman terhadap keamanan manusia dan stabilitas negara dari degradasi lingkungan, penyakit menular, perubahan iklim, dan kegiatan para aktor non-negara (Buzan, 2008 : 8).

2.6 Nuklir

Nuklir merupakan salah satu sumber energi di alam ini yang diketahui manusia bagaimana mengubahnya menjadi energi panas dan listrik. Sejauh ini, energi nuklir adalah sumber energi yang yang paling padat dari semua sumber energi di alam ini yang bisa dikembangkan manusia. Artinya, kita dapat mengekstrak lebih banyak panas dan listrik dari jumlah yang diberikan dibandingkan sumber lainnnya dengan jumlah yang setara. Kata nuklir berarti bagian dari atau yang berhubungan dengan *nukleus* atom (inti atom) (Whardana, 2007 : 86-88).

2.6.1 Nuklir Sebagai Isu Internasional

Penggunaan bom atom atas Hiroshima (6 Agustus 1945) dan Nagasaki (9 Agustus 1945) memang telah berhasil mengakhiri Perang Dunia II untuk kemenangan pihak sekutu. Namun, di lain pihak pengalaman itu juga telah mengubah sikap sebagian masyarakat dunia atas penggunaan senjata nuklir pada umumnya dalam situasi perang. Kekhawatiran ini kemudian terbukti karena tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II justru muncul Perang Dingin di antara negara-negara sekutu itu sendiri dalam kerangka perbedaan ideologi dalam merebut dominasi atau hegemoni dunia (Wirengjurit, 2002 : 12).

Sejak saat itu pula kontroversi mengenai penggunaan senjata nuklir ini mulai menjadi salah satu topik utama dalam hubungan internasional. Masa Perang dingin ini ditandai dengan perlombaan senjata (nuklir) secara besar-besaran antara kedua negara adidaya untuk mewujudkan ambisi mereka menjadi negara *super power*.

2.6.2 Non-Proliferasi Nuklir

Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, umumnya dikenal sebagai *Non-Proliferation Treaty* atau NPT, merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk mencegah penyebaran senjata nuklir dan teknologi senjata. Perjanjian ini memiliki tiga pokok utama, yaitu non-proliferasi, perlucutan, dan hak untuk menggunakan teknologi nuklir untuk kepentingan damai (*United Nations Office for Disarmament Affairs* melalui https://www.un.org/disarmament/wmd/ diakses 20 Desember 2016).

Traktat ini ditujukan untuk mencegah terjadinya perang nuklir yang besar kemungkinan terjadinya apabila penyebaran senjata nuklir di dunia tidak dikontrol. Selain itu, traktat ini merupakan suatu bentuk konkrit dari upaya untuk menghentikan

adanya perlombaan senjata nuklir antar negara, menghilangkan ketegangan dan menumbuhkan rasa saling percaya antar negara, dan pada akhirnya pemusnahan senjata nuklir dari muka bumi.

2.7 Kerangka Pemikiran

Hubungan Amerika Serikat dan Korea Utara yang berseteru telah berkembang terutama selama Perang Korea, namun dalam beberapa tahun terakhir dipertegas oleh lima uji coba nuklir Korea Utara, perkembangannya dari rudal jarak jauh yang mampu menyerang target ribuan mil jauhnya, dan ancaman berkelanjutan untuk menyerang Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan senjata nuklir dan pasukan konvensional.

Korea Utara, menjadi isu internasional ketika berusaha mengembangkan nuklirnya pada tahun 2002 dan disinyalir memproduksi senjata pemusnah massal untuk diekspor ke negara-negara lain. Hal ini yang menyebabkan Amerika Serikat berniat untuk melucuti senjata-senjata konvensional terhadap beberapa negara yang akan mengancam kepentingan nasional Amerika Serikat.

Secara konseptual, keamanan menjadi penting untuk diperhatikan, khususnya dalam menjaga stabilitas keamanan internasional. Apalagi, sekuritisasi menjadi konsep yang harus dipertahankan dan diimplementasikan secara terstruktur. Dengan melihat esensi dari keamanan yang bersifat intersubjektif serta konstruksi dari wacana sosial. Karenanya, sekuritisasi dilakukan oleh semua orang, baik secara individu, kelompok, dan negara. Sehingga muncullah kekhawatiran akan direspon oleh beberapa kalangan manusia untuk melakukan pencegahan sebelum datangnya ancaman.

Munculnya isu nuklir dianggap sebagai ancaman terhadap kemanan internasional dengan menlihat dampak yang ditimbulkan. Melihat konsep keamanan yang dipaparkan oleh para ahli membuat su nuklir semakin urgen Karena pada dasarnya *security* (keamanan) merupakan hasil konstruksi dari pikiran manusia. Isu nuklir bukan hanya berlandaskan pada kemanan nasional tapi juga mengarah pada keamanan lingkungan, kesehatan, dan politik serta kemanan hidup. Kepemilikan senjata nuklir oleh beberapa negara pemilik nuklir dan negara yang tidak memiliki nuklir membuat dampak yang cukup signifikan terhadap lingkungan dan kesehatan atas radiasi nuklir. Selain itu, kerusakan pada lingkungan sering terjadi ketika negara sedang melakukan uji coba nuklir, walaupun pada dasarnya setiap negara memiliki lahan masing-masing untuk bereksperimen. Namun, tindakan uji coba nuklir tetap saja memiliki dampak terhadap masyarakat internasional.

Program nuklir Korea Utara menjadi salah satu isu utama keamanan dalam hubungan internasional. Dengan begitulah Korea Utara mengembangkan senjata nuklir, dengan alasan untuk menjaga stabilitas keamanan rezim Korea Utara dan juga menganggap Amerika sebagai musuh besar mereka yang dapat mengancam mereka. Amerika Serikat pun mengganggap Korea Utara sebagai Negara pendukung teroris, dan Washington mengembargo ekonomi Pyongyang. Dengan adanya ketakutan Korea sebagai sasaran gempuran Amerika, Korea Utara bersikeras dalam pengembangan senjata nuklir, dengan adanya program nuklir Amerika tidak dapat memprovokasi militer terhadap Korea Utara. Keamanan Korea Utara dengan adanya senjata nuklir dapat meningkatkan motivasi Amerika untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara.

3. Metode Penelitian

Untuk melakukan sebuah penelitian diperlukan sebuah desain atau rancangan yang berisi rumusan tentang objek yang akan diteliti. Metode penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, metode ini dipilih karena penelitian kualitatif bisa dilakukan oleh peneliti dibidang ilmu sosial dan politik. Merujuk pada permasalahan yang diangkat serta variabel yang tersedia maka peneliti ini hanya melakukan analisa data berdasarkan data-data serta informasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika Serikat, serta sumber lain yang valid dan terpercaya. Dimana dalam masalah tersebut, lalu diimplementasikan dengan teori-teori dalam kajian Hubungan Internasional.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

4.1 Gambaran Umum Amerika Serikat

Amerika Serikat adalah salah satu negara di Benua Amerika khususnya Amerika Utara. Nama internasional Amerika Serikat adalah *United States of America* (USA). Sesuai dengan namanya (serikat), Amerika Serikat terdiri atas 50 negara bagian. Dua negara bagian, yakni Alaska dan Hawaii terpisah letaknya dari negara bagian lainnya. Alaska terletak di sebelah barat daya Kanada, dan Hawaii terletak lebih jauh lagi, yaitu di tengah-tengah Samudera Pasifik.

Secara umum berbagai arah kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) di tujuan nasionalnya yaitu memantapkan diri di dunia sebagai polisi dunia, dominasi sumber daya alam, orientasi ekonomi, penyebaran ideologi liberalisme dan demokrasi, keamanan nasional dan pemberantasan terorisme, serta mewujudkan sebuah tatanan dunia baru.

Dalam format politik internasional Amerika Serikat terdapat dua pilar paling mengemuka yang dijadikan kebijakan pokok negara, yaitu politik dan liberalisme ekonomi dunia. Dalam bidang politik, berbagai aturan yang jelas-jelas

bersumber dari ideologi kapitalisme dibuat dan diinternasionalisasikan. Lahirlah antara lain, Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (*Declaration of Human Right*s) tahun 1948. Deklarasi ini mencantumkan penjaminan atas kebebasan manusia; terutama kebebasan beragama, berpendapat, kepemilikan, dan perilaku. Internasionalisasi ini dibutuhkan AS agar setiap tindakannya di dunia internasional menjadi legal atau sah meskipun sebenarnya sekadar untuk kepentingan nasional (*national interest*) AS semata.

Kepentingan nasional yang vital adalah kondisi yang benar-benar diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan kelangsungan hidup orang Amerika Serikat dan kesejahteraan di negara bebas dan aman. Kepentingan nasional yang sangat vital bagi Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1. Mencegah, menghalangi, dan mengurangi ancaman senjata nuklir, biologi, dan kimia terhadap Amerika Serikat atau pasukan militernya di luar negeri.
2. Menjamin kelangsungan hidup sekutu Amerika Serikat dan kerjasama aktif AS dalam membentuk sistem internasional agar lebih berkembang.
3. Mencegah munculnya kekuatan-kekuatan besar yang bermusuhan atau negara gagal di perbatasan AS.
4. Menjamin kelangsungan hidup dan stabilitas sistem global (perdagangan, pasar keuangan, pasikan energi dan lingkungan.
5. Membangun hubungan yang produktif, konsisten dengan kepentingan nasional Amerika Serikat, dengan negara-negara yang bisa menjadi lawan yang strategis, Cina dan Rusia (Allison, 2010 : 3-6).

Strategi keamanan nasional Amerika Serikat pada dasarnya menekankan pada teori *Balance of Power*, yang dalam pemikiran kaum realis klasik dijelaskan sebagai tujuan politik yang bernilai yang memajukan keamanan nasional, menegakkan ketertiban di kalangan-kalangan besar, dan membuat kemerdekaan negara-negara dan masyarakat kemudian menjadi mungkin.

Pemerintahan Obama telah mengeluarkan strategi keamanan nasional yang baru pada tahun 2015, dengan menekankan perlunya meningkatkan kerjasama diplomatik internasional, dan menggunakan kekuatan militer sebagai upaya terakhir.

Berikut adalah Strategi Keamanan AS dibawah Pemerintahan Obama:

1. Kami akan memimpin dengan tujuan, dipandu oleh kepentingan nasional yang berkelanjutan dan nilai-nilai dan komitmen untuk memajukan prioritas yang seimbang dan layak oleh kekuatan yang besar.
2. Kami akan memimpin dengan kekuatan, memanfaatkan kebangkitan ekonomi, meningkatkan keamanan energi, militer yang tak tertandingi, serta kemampuan dan keragaman rakyat Amerika.
3. Kami akan memimpin dengan teladan, menjunjung tinggi nilai-nilai nasional dan kewajiban kami di luar negeri.
4. Kami akan memimpin dengan sekutu-sekutu yang mampu, memobilisasi aksi bersama dan membangun kapasitas sekutu untuk mengatasi tantangan global.
5. Kami akan memimpin dengan semua instrumen kekuasaan AS, memanfaatkan keuntungan strategis kami dalam diplomasi, pembangunan, pertahanan, intelijen, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan masih banyak lagi.
6. Kami akan memimpin dengan perspektif jangka panjang, yang mempengaruhi pergeseran pandangan terhadap keamanan saat ini untuk mengamankan kepentingan nasional di masa depan
   (*Fact Sheet: The 2015 National Security Strategy* melalui https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/02/06/fact-sheet-2015-national-security-strategy diakses 7 Maret 2017).

4.2 Korea Utara

Korea Utara, secara resmi disebut Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) adalah sebuah negara di Asia Timur, yang meliputi sebagian utara Semenanjung Korea. Ibu kota dan kota terbesarnya adalah Pyongyang. Pemerintahan negara mengikuti ideologi *Juche*, yang digagas oleh Kim Il-Sung, mantan pemimpin negara ini. *Juche* menjadi ideologi resmi negara ketika negara ini mengadopsi konstitusi baru pada 1972. Sementara resminya sebagai republik sosialis, Korea Utara dipandang oleh sebagian besar negara sebagai negara kediktatoran totaliterstalinis.

Hampir sama dengan pola pemerintahan yang ada di negara Uni Soviet, pemerintahan di negara Korea Utara juga bersifat terpusat. Negara memiliki semua faktor produksi masal yang ada di masyarakat, semua sektor besar seperti industri adalah milik pemerintah dan dinasionalisasikan serta tidak diperbolehkan adanya sektor bisnis milik pribadi dan industri swasta didalam negara.

Hubungan Korea Utara - Amerika Serikat yang bermusuhan dan telah berkembang terutama selama Perang Korea dalam beberapa tahun terakhir dipertegas dengan lima uji coba senjata nuklir Korea Utara, rudal jarak jauh yang mampu menyerang target ribuan mil jauhnya dan ancaman berkelanjutan untuk menyerang Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan senjata nuklir dan pasukan konvensional (http://www.nytimes.com/interactive/2013/04/12/world/asia/north-korea-questions.html?_r=1& diakses 19 Januari 2017).

Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) memiliki program senjata nuklir aktif dan telah menguji alat peledak nuklir pada tahun 2006, 2009, 2013, dan dua kali pada tahun 2016. Korea Utara juga mampu memperkaya uranium dan memproduksi bahan plutonium. Korea Utara menluncurkan rudal balistik jarak pendek dan jarak menengah dan berhasil meluncurkan roket jarak jauh pada tahun 2012 dan 2016. Korea Utara juga diyakini memiliki program senjata biologi dan kimia (*Nuclear Threat Initiative*, 2016 melalui http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/ diakses 20 Januari 2017).

Korea Utara telah dicurigai mempertahankan program pengembangan senjata nuklir rahasia sejak awal 1980-an, ketika membangun sebuah *Magnox* reaktor nuklir penghasil plutonium di Yongbyon. Berbagai cara diplomatik telah digunakan oleh masyarakat internasional untuk mencoba untuk membatasi program nuklir Korea Utara untuk perdamaian dan untuk mendorong Korea Utara untuk berpartisipasi dalam perjanjian internasional (*International Atomic Energy Agency*, melalui https://www.iaea. org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nucl ear-safeguards diakses 20 Januari 2017).

Krisis nuklir Korea Utara dimulai pertama kali saat Korea Utara menarik diri dari *Nuclear Non-Proliferation* (NPT) atau Perjanjian Non-Proliferasi nuklir pada tahun 1993. Tindakan Korea Utara menarik diri dari NPT jelas menimbulkan reaksi dunia, khususnya Amerika Serikat. Korea Utara menandatangani pernyataan sepakat untuk menaati perjanjian NPT itu dengan *International Atom and Energy Agency* (IAEA) atau Badan Tenaga Atom Internasional pada Januari 1992. Sebagai syarat untuk perjanjian itu, pihak IAEA melakukan 6 kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir telah diekstrak. Hal ini berbeda jauh dengan laporan Korea Utara yang mengatakan kepada IAEA bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 gram bahan nuklir dari fasilitas nuklirnya (Kronologi Program Nuklir Korut melalui http://world.kbs.co.kr/indonesian/ event/nkorea_nuclear/news_02.htm diakses 18 Oktober 2016).

4.3 Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat Terhadap Program Pengembangan Nuklir Korea Utara Pada Masa Pemerintahan Barack Obama

4.3.1 *Strategic Patience Approach*

Kegagalan yang dialami AS dan Korea Utara dalam beberapa kesepakatan mengenai program nuklir Korea Utara membuat AS merasa harus menerapkan cara diplomasi berbeda terhadap Pyongyang. Sikap dan perilaku Korea Utara terhadap AS yang berubah-ubah membuat AS harus menerapkan kebijakan yang dapat menyesuaikan perilaku Korea Utara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, AS menerapkan kebijakan luar negeri *Strategic Patience Approach* terhadap Korea Utara.

Kebijakan "*Strategic Patience*", yakni kebijakan yang menyatakan bahwa Amerika Serikat bisa menunggu Korea Utara untuk membuat keputusan denuklirisasi, selaras dengan realitas politik atas kasus tenggelamnya kapal Korea Utara dan penembakan terhadap Pulau Yeonpyeong di Korea Selatan pada bulan Maret dan November 2010.

"*Strategic Patience*" *Approach* menurut Emma Chanlett-Avery, spesialis hubungan luar negeri kawasan Asia, dan Ian E. Rinehart, analis hubungan luar negeri kawasan Asia, dalam *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*, adalah kebijakan yang bertujuan untuk bernegosiasi terhadap Korea Utara dengan menerapkan dua cara pendekatan, yaitu:

1. *Waits* atau kesabaran, yaitu usaha diplomasi terhadap Korea Utara untuk bernegosiasi dalam meja perundingan,
2. Pemberian tekanan terhadap rezim Korea Utara. Unsur-unsur utama kebijakan tersebut didasarkan pada pemberian tekanan kepada Pyongyang untuk berkomitmen mengambil langkah menuju denuklirisasi, berkoordinasi erat dalam perundingan dan perjanjian dengan Jepang dan Korea Selatan, pendekatan terhadap Cina untuk mengambil tindakan keras terhadap Korea Utara (Avery & Rinehart, 2014 : 6).

4.3.2 Kerjasama Trilateral Dengan Korea Selatan Dan Jepang

Presiden Obama mengadakan pertemuan trilateral bersama dengan President Park dan Perdana Menteri Abe di Washington DC dimana tiga pemimpin menekankan pentingnya kerjasama trilateral. Dalam pertemuan tiga pihak yang berlangsung untuk pertama kali selama 2 tahun pada hari Kamis 31 Maret 2016 waktu setempat, ketiga pemimpin negara setuju untuk menerapkan secara kesuluruhan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270. Setelah mengikuti pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam, presiden Park Geun-hye mengatakan bahwa dirinya beserta presiden Obama dan PM Abe sepakat tentang perlunya untuk meyakinkan Korea Utara bahwa senjata nuklir tidak akan membantu negara itu (http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_ detail.htm?No=40846 diakses 7 Maret 2017).

Amerika juga merapatkan barisan dengan Jepang dan Korea Selatan dalam menemukan cara

untuk melawan aktivitas proliferasi Korea Utara. Ketiga negara bekerja sama untuk memastikan semua negara memahami dan mampu melaksanakan sepenuhnya kewajiban mereka di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2270. Melalui kerjasama ini sudah terlihat kemajuan dalam beberapa bidang utama, seperti memutuskan aktivitas perdagangan senjata dan menanggulangi kapal-kapal Korea Utara. Kerjasama ini juga berupaya untuk fokus terhadap pemotongan sumber pendapatan bagi program senjata nuklir dan balistik rezim Korea Utara, termasuk pendapatan yang dihasilkan melalui perdagangan batubara maupun yang berasal dari luar negeri oleh para pekerja Korea Utara.

Ketiga negara juga akan berkoordinasi dalam forum multilateral, termasuk PBB, KTT Asia Timur, *International Civil Aviation Organization* (ICAO), dan *International Maritime Organization* (IMO), untuk memastikan bahwa negara-negara lain bergabung dalam mengutuk tindakan provokatif Korea Utara dan sepenuhnya menegakkan sanksi PBB terhadap rezim tersebut (https://www.humanrights.gov/dyn/09/-trilateral-cooperation-between-the-united-states-japan-and-the-republic-of-korea/ diakses 7 Maret 2017).

Ketiga negara juga memiliki kerjasama militer. Pertemuan ketiga negara tersebut diadakan di Departemen Pertahanan AS, pada Jumat, 14 Oktober 2016. Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Staf Gabungan Militer AS, Jenderal Joseph Dunford yang bertemu dengan kepala Staf Gabungan Pasukan Militer Terpadu SDF (*Self-Defense Forces*) Jepang Laksamana Katsutoshi Kawano, dan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan Lee Sun-jin. Ketiga negara memiliki kerjasama dalam berbagi informasi rahasia terkait program nuklir dan rudal Korea Utara. Dalam pertemuan tersebut Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya dalam membela Korea Selatan dan Jepang. AS akan menggunakan seluruh kemampuan militernya mulai dari konvensional, nuklir, hingga pertahanan rudal guna menangkal Korea Utara (http://www.tribunnews.com/internasional/2016/10/16/amerika-jepang-dan-korea-selatan-bahas-uji-coba-nuklir-dan-peluncuran-rudal-korea-utara diakses 7 Maret 2017).

4.3.3 Meningkatkan Hubungan Dengan Cina

Presiden Amerika Serikat Barack Obama dan Presiden Cina Xi Jinping sepakat untuk tidak menerima Korea Utara yang memiliki senjata nuklir dan bekerja sama untuk mengakhiri program nuklir Korea Utara dan menegaskan mereka akan terus bersatu dalam menentang kemajuan nuklir rezim tersebut. AS telah lama mendesak Cina, sekutu tradisional Korea Utara, untuk mengambil peran lebih kuat dalam menekan Korea Utara untuk menghentikan program senjata nuklirnya. Pemerintahan Obama juga didorong oleh peran Cina yang meninggalkan sanksi ketat PBB dalam menghukum Korea Utara, dan mendesak Beijing untuk menerapkan sanksi tersebut secara patuh (http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1932756/xi-jinping-and-barack-obama-agree-cooperate-confront diakses 8 Maret 2017).

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Gedung Putih, disebutkan bahwa kedua kepala negara bertekad untuk meningkatkan kerjasama dan memperkuat koordinasi dalam mencapai denuklirisasi di Semenanjung Korea, termasuk lewat penerapan secara penuh Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2270, serta resolusi terkait lainnya. Gedung Putih percaya bahwa Cina bisa berbuat lebih banyak untuk menekan Korea Utara untuk meninggalkan program nuklir dan rudalnya namun Cina khawatir bila terlalu menekan bisa mendorong ketidakstabilan dan pergolakan daerah. Menurut Cina semua pihak harus menghindari kata-kata atau tindakan yang mungkin akan lebih meningkatkan ketegangan di semenanjung Korea dan melakukan apa yang dapat mempengaruhi kepentingan keamanan negara-negara lain (http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=43658&id=Po diakses 8 Maret 2017).

Perdana Menteri Cina Li Keqiang mengatakan kepada Presiden AS Barack Obama bahwa Beijing mendukung kerjasama yang lebih erat di Dewan Keamanan PBB dan dalam upaya penegakan hukum untuk menghentikan program nuklir Korea Utara. Ini bisa menjadi sinyal Beijing akan mendukung sanksi lebih keras terhadap Korea Utara setelah uji coba nuklir kelima, dengan Cina semakin kesal dengan perilaku Pyongyang dan konsekuensinya; keputusan oleh Seoul untuk menggelar sistem anti-rudal AS. Selama pertemuan antara Li dan Obama di sela-sela sidang Majelis Umum PBB tahunan di New York pada 20 September 2016, kedua pemimpin mengutuk uji coba nuklir Korea Utara pada 9 September dan memutuskan untuk memperkuat koordinasi dalam mencapai denuklirisasi semenanjung Korea. Li juga menegaskan selama pembicaraannya dengan Obama pemerintahannya menolak untuk penyebaran perisai rudal AS di Korea Selatan, dan meminta semua pihak untuk menahan diri dari setiap kegiatan yang mungkin meningkatkan ketegangan di wilayah tersebut (http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2020872/china-us-step-cooperation-halt-north-koreas-nuclear diakses 8 Januari 2017).

4.3.4 *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD)

THAAD (*Terminal High Altitude Area Defense*) adalah sistem pertahanan rudal yang unik dan canggih dengan presisi yang tak tertandingi,

mampu melawan ancaman di seluruh dunia dengan mobilitas tinggi dan penempatan baterai unit strategis. THAAD yang dibangun oleh *Lockheed Martin* disebut sebagai sistem rudal paling canggih. Pencegat THAAD bisa berburu dan meledakkan rudal musuh dengan tingkat keberhasilan 100%. Pencegat ini tidak dilengkapi dengan hulu ledak yang berarti rudal hanya menggunakan energi kinetik murni untuk mengancurkan target yang dihantamnya (https://www.jejaktapak.com/2016/08/21/mengenal-sistem-pertahanan-rudal-amerika-serikat/ diakses 22 Januari 2017).

Amerika Serikat percaya Korea Utara mempunyai kemampuan untuk menempatkan kepala nuklir atau hulu ledak pada rudal balistik KN-08 dan akan menembakkannya ke daratan Amerika Serikat (http://www.stripes.com/news/ norad-commander-north-korean-kn-08-missile-operational-1.338909 diakses 21 Januari 2017).

Dengan adanya ancaman rudal Korea Utara tersebut, menurut Deputi Direktur Urusan Politik-Militer wilayah Asia di Departemen Pertahanan Amerika Serikat David Stiwell, mengatakan bahwa kondisi ini akhirnya telah menciptakan suatu kebutuhan bagi sistem pertahanan anti rudal balistik Amerika Serikat yakni sistem THAAD untuk di tempatkan di Semenanjung Korea sebagai pelindungan terhadap wilayah sekutu, pasukan Amerika Serikat serta untuk wilayah Amerika Serikat sendiri.

Untuk menghadapi potensi ancaman rudal balistik di kawasan Asia Timur khususnya Korea Utara, Amerika Serikat telah membuat suatu pertahanan rudal balistik (*Ballistic Missile Defense* - BMD) sebagai komponen utama untuk perlindungan terhadap pasukan Amerika Serikat yang ditempatkan di seluruh dunia, dan juga sebagai perlindungan terhadap keamanan sekutu. Amerika Serikat kemudian mengerahkan aset-aset BMD-nya dengan mengirimankan dua kapal perusak yang juga dilengkapi dengan fasilitas persenjataan anti rudal ke pasifik barat, serta juga telah mengerahkan sistem rudal pencegat THAAD dan PAC-3 di wilayah Alaska dan Guam. Amerika Serikat juga membentuk kerjasama BMD dengan negara-negara di kawasan Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan agar dapat menyebarkan sistem pertahanannya di kawasan tersebut (Bubnova, 2013 : 293).

4.3.5 Pertemuan Tingkat Tinggi Dengan Korea Utara

Pada 8 hingga 10 Desember 2009 para pejabat untuk pemerintahan Obama mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama mereka dengan pemerintah Korea Utara di Pyongyang. Perwakilan khusus kebijakan AS untuk Korea Utara Stephen Bosworth memimpin delegasi ke Pyongyang, dimana ia memberikan surat dari Presiden Obama untuk Kim Jong-Il. Kunjungan ini merupakan hubungan tingkat tinggi pertama antara pemerintahan Presiden AS Barrack Obama dan Pyongyang.

Pejabat AS mengatakan Bosworth akan mencari kemungkinan apakah Pyongyang siap untuk kembali melakukan pembicaraan enam negara mengenai program nuklir yang terhenti sejak April 2009. Tetapi Pyongyang tidak akan ditawari imbalan apapun untuk melakukannya. Korea Utara mendesak untuk melakukan pembicaraan langsung dengan AS. Tetapi AS mengatakan akan mengadakan pembicaraan bilateral sebagai pendahuluan untuk kembali ke negosiasi enam negara.

Pejabat senior Gedung Putih mengatakan kunjungan pertama Bosworth ke Korea Utara tidak dimaksudkan untuk melanjutkan perjanjian bilateral. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk memutuskan apakah Korea Utara siap dan bersedia untuk kembali menjalankan pembicaraan enam negara dan memulai lagi diskusi serius tentang denuklirisasi di Semenanjung Korea (http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2009/12/091208_korut.shtml diakses 18 Maret 2017).

Perwakilan Khusus AS untuk Kebijakan Korea Utara Stephen Bosworth dan Menteri Luar Negeri Korea Utara Kim Gye Gwan bertemu di New York pada 28-29 Juli 2011, sebagai bagian dari upaya untuk menghidupkan kembali perundingan multilateral mengenai program nuklir Korea Utara. Hal ini menandai pertemuan tingkat tinggi pertama antara Amerika Serikat dan Korea Utara dalam hampir dua tahun, dan Amerika Serikat dilaporkan menegaskan kesediaannya untuk memulai kembali perundingan jika Korea Utara berkomitmen untuk menjadi mitra yang berguna dalam proses negosiasi. Setelah 23-24 Februari 2011; pertemuan antara Amerika Serikat dan Korea Utara di Beijing, kedua negara mengumumkan dalam pernyataan terpisah kesepakatan dengan Korea Utara untuk menghentikan operasi di pabrik pengayaan uranium Yongbyon, mengundang inspektur IAEA untuk memantau suspensi, dan melaksanakan moratorium pada tes rudal nuklir jarak jauh (*Arms Control Association*, 2011 melalui https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses 3 Desember 2016).

4.3.6 Menjatuhkan Sanksi Terhadap Korea Utara

Presiden AS Barack Obama, Presiden Korea Selatan Park Geun-hye, dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sepakat untuk bersama-sama mengambil langkah yang signifikan, termasuk sanksi baru, untuk menunjukkan kepada Korea Utara bahwa ada konsekuensi terhadap setiap tindakan yang melanggar hukum dan berbahaya. Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang segera

mengadakan rapat darurat tertutup dengan Dewan Keamanan PBB, dimana Dewan Keamanan sangat mengutuk uji coba tersebut dan mengatakan bahwa akan mengambil langkah signifikan untuk merespons uji coba tersebut. Pernyataan tersebut mengatakan tindakan non-militer, tindakan seperti sanksi akan diambil berdasarkan Pasal 41 Piagam PBB (https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2016/03/31/remarks-president-obama-president-park-geun-hye-republic-korea-and-prime diakses 20 Oktober 2016).

Pada 16 Maret 2016, Obama menandatangani perintah untuk menjatuhkan sanksi tambahan pada Korut atau yang disebut "*North Korea Sanctions and Policy Enhancement Act of 2016*" atas program nuklirnya. Sanksi tersebut meliputi pembekuan aset pemerintah Korut di AS, larangan ekspor dan investasi, juga memperpanjang daftar hitam bagi siapa pun termasuk non-Amerika yang berurusan dengan Korut. Dewan Keamanan PBB juga menjatuhkan sanksi termasuk perintah untuk menginspeksi seluruh kargo yang meninggalkan dan masuk Korut baik melalui darat, laut maupun udara. Korut juga dilarang menjual atau membeli senjata dalam jumlah kecil atau banyak. Setiap negara dilarang menjual senjata ke Pyongyang. Selain itu, setiap diplomat yang terlibat dalam aktivitas terlarang harus menjalani pengusiran dari negara (http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-un-idUSKCN0W41Z2 diakses 9 Maret 2017).

Departemen Keuangan AS juga mengumumkan bahwa telah menjatuhkan sanksi terhadap Kim Jong Un, yakni pembekuan aset-aset Kim di AS dan melarang warga AS berbisnis dengannya. Selain Kim, ada 10 petinggi Korut lainnya yang dijatuhi sanksi serupa dan kepada delapan organisasi Korea Utara karena terlibat dalam program nuklir dan rudal Pyongyang. Lalu pada 18 April 2011 Presiden AS Barack Obama mengeluarkan perintah eksekutif yaitu menegaskan kembali larangan atas impor barang, jasa, dan teknologi dari Korea Utara (*Chronology of U.S-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy*, *Arms Control Association* melalui https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron diakses pada 3 Desember 2016).

5. Kesimpulan

Korea Utara merupakan negara pemilik nuklir dengan kekuatan militer yang sangat besar yang dinilai sebagai ancaman serius bagi Amerika Serikat. Dengan mengatasnamakan kemanusiaan dan gerakan non-proliferasi nuklir, Amerika Serikat berupaya mendesak Korea Utara agar mau menghentikan dan memusnahkan program pengembangan nuklirnya.

Kegagalan yang dialami AS dan Korea Utara dalam beberapa kesepakatan mengenai program nuklir Korea Utara membuat AS merasa harus menerapkan cara diplomasi berbeda terhadap Pyongyang. Sikap dan perilaku Korea Utara terhadap AS yang berubah-ubah membuat AS harus menerapkan kebijakan yang dapat menyesuaikan perilaku Korea Utara.

Pada masa pemerintahan Obama, Amerika telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan demi merealisasikan denuklirisasi Korea Utara. Diantaranya adalah dengan melakukan diplomasi multilateral yang aman dan berkelanjutan dimana diantaranya adalah *Strategic Patience Approach*, bekerja sama secara trilateral bersama Korea Selatan dan Jepang, penginstalasian *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD), mengadakan pertemuan tingkat tinggi dengan Korea Utara, memberlakukan sanksi-sanksi terhadap korut maupun yang terlibat, menyelaraskan kepentingan dengan Cina dengan mengandalkan Cina untuk menekan Korea Utara, dan dengan melakukan pencegahan-pencegahan serta upaya multilateral demi menyelesaikan masalah nuklir Korea Utara untuk mengakhiri isolasi negara tersebut, menghargai hak-hak asasi rakyatnya sendiri, menghormati komitmen masa lampau, dan mematuhi kewajiban internasional.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan Amerika Serikat terhadap program nuklir Korea Utara tersebut, dapat disimpulkan bahwa Barack Obama lebih memilih pendekatan multilateral untuk mengelola konflik sekaligus menekankan "*smart power*"; pendekatan yang mencoba untuk mengintegrasikan pengembangan diplomatik dan internasional dengan militer untuk mempromosikan stabilitas regional.

Daftar Pustaka

Acuan dalam jurnal:

Allison, Graham. 2010. *America's National Interests: A Report from The Commission on America's National Interests*. JHU/APL Rethinking Seminar Series: Harvard University.

Avery, Emma C dan Rinehart, Ian E. *North Korea: U.S. Relations, Nuclear Diplomacy, and Internal Situation*. U.S. State Department: Congressional Research Service (CRS) Report no. 7-5700.

Muna, Riefqi. 2009. Paradigma Pertahanan dari *Hard Power* ke *Smart Power*. Jakarta: Pusat Studi Pertahanan dan Perdamaian FISIP Universitas Al Azhar Indonesia. Vol. 5, no. 1.

Seung-Yoon, Yan dan Mas'oed, Mohtar. 2003. Politik, Ekonomi, Masyarakat Korea: Pokok-pokok Kepentingan dan Permasalahannya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Acuan dalam buku:

Breuning, Marijke. 2007. *Foreign Policy*: *Analysis Comparative Introduction*. New York: Palgrave MacMillan.

Bubnova, Natalia. 2013. *Missile Defense Confrontation and Cooperation*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Buzan, Barry. 2008. *People, State and Fear*. Eropa: ECPR.

Dugis, Vinsensio. 2007. *Analyzing Foreign Policy*. Jakarta: Grasindo.

Perwita B, Anak Agung dan Yani M, Yanyan. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Cetakan Pertama. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Shoelhi, Mohammad. 2011. Diplomasi: Praktik Komunikasi Internasional. Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Wardhana, Wisnu Arya. 2007. Teknologi Nuklir. Bandung: Andi.

Wirengjurit, Dian. 2002. Kawasan Damai dan Bebas Senjata Nuklir: Pengertian, Sejarah dan Perkembangannya. Bandung. PT. Alumni.

Acuan artikel dalam situs:

Amerika, Jepang, dan Korea Selatan Bahas Uji Coba Nuklir dan Peluncuran Rudal Korea Utara. 2016. Srihandriatmo Malau: Tribunnews melalui http://www.tribunnews.com/internasional/2016/10/16/amerika-jepang-dan-korea-selatan-bahas-uji-coba-nuklir-dan-peluncuran-rudal-korea-utara

China, US to Step Up Cooperation to Halt North Korea's Nuclear Weapons Programme. 2016. Catherine Wong dan Laura Zhou: South China Morning Post melalui http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/2020872/china-us-step-cooperation-halt-north-koreas-nuclear

Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy. 2016. Arms Control Association melalui https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron

Fact Sheets on North Korea Nuclear Safeguards. 2016. International Energy Atomic Agency melalui https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards

Fact Sheet: The 2015 National Security Strategy. 2015. Office of the Press Secretary: The White House of Barack Obama melalui https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/02/06/fact-sheet-2015-national-security-strategy

Etalase Tentang Korea Utara. 2016. Korean Broadcasting System (KBS) melalui http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/news_02.htm

In Focus: North Korea's Nuclear Threats. 2013. The New York Times melalui http://www.nytimes.com/interactive/2013/04/12/world/asia/north-korea-questions.html?_r=1&

On the Detection of The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization in North Korea. 2012. Annika Thunborg: The Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization melalui http://www.ctbto.org/press-centre/press-releases/2013/on-the-ctbtos-detection-in-north-korea/

Mengenal Sistem Pertahanan Rudal Amerika Serikat. 2016. Jejak Tapak melalui https://www.jejaktapak.com/2016/08/21/mengenal-sistem-pertahanan-rudal-amerika-serikat/

NORAD Commander: North Korean KN-08 Missile Operational. 2015. John Harper: Stars and Stripes melalui http://www.stripes.com/news/norad-commander-north-korean-kn-08-missile-operational-1.338909

North Korea Nuclear Tests: What Did They Achieve?. 2016. British Broadcasting Corporation (BBC) melalui http://www.bbc.com/news/world-asia-17823706

North Korea Threatens to Strike Without Warning. 2013. Cable News Network (CNN) melalui http://edition.cnn.com/2013/04/15/world/asia/north-korea-ultimatum/index.html

North Korea Strategic Threat. 2016. The Nuclear Threat Initiative (NTI) melalui http://www.nti.org/learn/countries/north-korea/

Presiden Obama dan Xi Bahas Ancaman Korea Utara di APEC. 2016. Korean Broadcasting System (KBS) melalui http://world.kbs.co.kr/indonesian/news/news_Po_detail.htm?No=43658&id=Po

Remarks by President Obama, President Park Geun-Hye of the Republic of Korea, and Prime Minister Shinzo Abe of Japan After Trilateral Meeting. 2016. The White House of Barack Obama melalui https://obamawhitehouse.archives.gov/the-pressoffice/2016/03/31/remarks-president-obama-president-park-geun-hye-republic-korea-and-prime

Statement by the President on North Korea's Nuclear Test. 2016. Office of the Press Secretary: The White House of Barack Obama melalui https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/09/09/statement-president-north-koreas-nuclear-test

Trilateral Cooperation Between the United States, Japan, and the Republic of Korea. 2016. Daniel R. Russel: Bureau of East Asian and Pacific Affairs melalui https://www.humanrights.gov/dyn/09/-trilateral-cooperation-between-the-united-states-japan-and-the-republic-of-korea/

UN, IAEA Denounce N. Korean Actions. 2016. Elizabeth Philipp: Arms Control Association melalui https://www.armscontrol.org/ACT/2016_07/News/ UN-IAEA-Denounce-North-Korean-Actions

U.S. Policy Toward North Korea. 2013. Scott A. Snyder: Council on Foreign Relations melalui http://www.cfr.org/north-korea/us-policy-toward-north-korea/p29962

Utusan AS Mulai Misi ke Korut. 2009. British Broadcasting Corporation (BBC) melalui http://www.bbc.com/indonesia/dunia/2009/12/091208_korut.shtml

Weapons of Mass Destruction. 2016. United Nations Office for Disarmament Affairs (UNODA) melalui https://www.un.org/disarmament/wmd/

Xi Jinping and Barack Obama Agree to Cooperate to Confront North Korean Nuclear Threat. 2016. South China Morning Post melalui http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1932756/xi-jinping-and-barack-obama-agree-cooperate-confront#comments

U.N. Imposes Harsh New Sanctions on North Korea Over Its Nuclear Program. 2016. Louis Charbonneau dan Michelle Nichols: Reuters melalui http://www.reuters.com/article/us-northkorea-nuclear-un-idUSKCN0W41Z2